



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN TELUK WONDAMA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran, yang tata cara pengalokasiannya ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan besaran alokasi dana Kampung di setiap Kampung di Kabupaten Teluk Wondama;
 - c. bahwa pengaturan tentang besaran alokasi dana Kampung dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam huruf b, perlu disesuaikan dengan

dinamika kebutuhan setiap kampung sehingga perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2008 Nomor 18);
 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Kampung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
4. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II
TATA CARA PEMBAGIAN DAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Rincian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara berkeadilan untuk membiayai Belanja Pegawai berupa honor/Insentif Kepala Kampung dan Aparatnya, Tunjangan Baperkam serta Insentif Rukun Tetangga, Tokoh-tokoh dan Hansip yang dibagi secara berkeadilan dengan memperhitungkan jumlah Rukun Tetangga, Pertahanan Sipil, Jarak transportasi ke Kabupaten dan Alokasi Kinerja Kepala Kampung. Serta belanja operasional Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Bamuskam sesuai Keputusan Bupati.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana kampung setiap kampung mempertimbangkan Insentif Kepala Kampung Persiapan dan operasional Kampung Persiapan.

Pasal 3

- (1) Alokasi kinerja diberikan kepada lima belas kampung yang dinilai pengelolaan Anggaran Dana Kampung lebih baik dari 75 kampung selama tiga tahun berturut-turut.
- (2) Alokasi kinerja dinilai berdasarkan kategori:
 - a. hasil audit dari auditor dalam pengelolaan dana oleh setiap kampung yang dinilai 3 tahun terakhir;
 - b. ketaatan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. disiplin dalam pengelolaan anggaran 2 tahun terakhir.
- (3) Alokasi kinerja dimaksud pada ayat (2) diambil dari total ADD Kabupaten sebesar 2,25 % (Dua Koma Dua Lima Persen yang diberikan kepada 15 (lima belas) kampung terbaik.

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung dan besaran penghasilan tetap serta jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Kampung, Aparat Kampung, Tunjangan Baperkam, Insentif Rukun Tetangga, Tokoh-tokoh dan Hansip serta besaran jaminan sosial kesehatan Kepala Kampung dan perangkat kampung dapat dilihat dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Januari s/d Juni minggu ke dua sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan April s/d September minggu sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Agustus s/d Desember minggu ke tiga sebesar 20% (dua puluh per seratus)
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP);
 - b. Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Bupati; dan
 - c. laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampung dan laporan pertanggungjawaban tahap I kepada Bupati.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap III dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampung dan laporan pertanggungjawaban tahap II kepada Bupati; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampung tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober.
- (6) Rincian Alokasi Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APB Kampung setelah dilakukan musyawarah kampung.

Pasal 6

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Kampung harus dipertanggungjawabkan yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APB Kampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan menjadi peraturan Kampung kecuali dalam keadaan darurat atau menyangkut kepentingan masyarakat kampung dalam keadaan tertentu.
- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara dan atau dilakukan pemotongan langsung dalam rangka menyelamatkan pajak untuk pendapatan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Camat/Kepala Distrik setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Kampung dalam hal Kepala Kampung tidak menyampaikan peraturan kampung tentang APB Kampung dan/atau laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Kampung dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati dapat mengurangi Alokasi Dana Kampung tahun berikutnya apabila ditemukan penggunaan Anggaran yang tidak sesuai APBKampung dan penyalagunaan anggaran tahun berjalan setelah dilakukan audit dari pihak yang berwenang serta ditemukan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Alokasi Dana Kampung serta penggunaan anggaran tidak sesuai APBKampung yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Kampung yang melebihi 30% (Tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Kampung yang diterima Kampung.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 20 April 2023

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 20 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,


CAP/TTD

DENNY SIMBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROBERT M. P. NUNAKI, SH
NIP. 19760410 260312 1 007

Lampiran : Peraturan Bupati Teluk Wondama
 Nomor : 21 Tahun 2023
 Tanggal : 20 April 2023

**DAFTAR ALOKASI DANA KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	JML APARAT & UNSUR DI KAMPUNG				SILTAP/TUNJANGAN/INSENTIF UNSUR DIKAMPUNG				JMLH HONOR/TUNJANGAN/INSENTIF	Anggaran OPS Pemekaran Sesuai Kategori	ALOKASI KINERIA	BPIS KETENAGA KERAJAAN	BPIS KESEHATAN	OPERASIONAL & PROGRAM KEGIATAN	PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG	
			Kades + Perang Kart	RT	BPD	tokoh/linmas	Kades & pengikat	RT	Baperkrim	Tokoh2								Linmas
1		RADO	8	3	5	5	2	192,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	394,500,000	130,700,000	4,692,000	2,560,000	172,610,100	705,062,100
2		DOTIR	8	2	5	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	261,400,000	4,488,000	2,560,000	197,610,100	602,158,100
3		MANIWAK	8	4	5	5	2	192,900,000	36,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	403,500,000	130,700,000	4,896,000	2,560,000	172,610,100	844,966,100
4		WASIOR I	8	4	5	5	4	204,900,000	36,000,000	115,200,000	45,000,000	28,800,000	429,900,000	130,700,000	4,896,000	2,560,000	172,610,100	740,666,100
5	WASIOR	MAIMARI	8	3	5	5	3	193,800,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	21,600,000	402,600,000	130,700,000	4,896,000	2,560,000	197,610,100	607,866,100
6		MORU	8	3	5	5	2	192,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	394,500,000	130,700,000	4,692,000	2,560,000	172,610,100	705,062,100
7		MANOPI	8	2	5	5	2	193,800,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	386,400,000	130,700,000	4,488,000	2,560,000	172,610,100	696,758,100
8		RAMIKI	8	2	5	5	2	192,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	385,500,000	130,700,000	4,488,000	2,560,000	197,610,100	590,158,100
9		IRIATI	8	3	5	5	2	204,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	406,500,000	261,400,000	4,692,000	2,560,000	172,610,100	847,762,100
10		WAMESA TENGAH	8	2	5	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	140,700,000	4,488,000	2,560,000	172,610,100	717,858,100
11		YOPMEOS	8	2	5	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	140,700,000	4,488,000	2,560,000	192,610,100	737,858,100
12	WINDESI	SOMBOKORO	8	2	5	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	140,700,000	4,488,000	2,560,000	192,610,100	737,858,100
13		WINDESI	8	2	5	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	140,700,000	4,488,000	2,560,000	192,610,100	737,858,100
14		SANDEY	8	2	5	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	140,700,000	4,488,000	2,560,000	192,610,100	811,804,100
15		AISANDAMI	8	3	5	5	2	204,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	406,500,000	130,700,000	4,692,000	2,560,000	192,610,100	737,062,100
16	TELUK DUAIRI	SOBEY	8	6	5	5	4	192,900,000	54,000,000	115,200,000	45,000,000	28,800,000	435,900,000	261,400,000	5,712,000	2,560,000	172,610,100	878,182,100
17		YOPANGGAR	8	2	5	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	281,400,000	4,488,000	2,560,000	192,610,100	878,558,100
18		SOBEY INDAH	8	3	5	5	2	204,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	406,500,000	130,700,000	4,692,000	2,560,000	172,610,100	791,008,100
19		WONDIBOY	8	2	5	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	130,700,000	4,488,000	2,560,000	172,610,100	707,858,100
20	WODIBOI	KABOUW	8	2	5	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	140,700,000	4,488,000	2,560,000	197,610,100	602,158,100
21		ISSU	8	3	5	5	2	204,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	406,500,000	140,700,000	4,692,000	2,560,000	197,610,100	611,362,100
22		KAJIBI	8	3	5	5	2	204,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	406,500,000	140,700,000	4,692,000	2,560,000	197,610,100	685,308,100
23		SABUBAR	8	3	5	5	2	192,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	394,500,000	140,700,000	4,692,000	2,560,000	217,610,100	619,362,100
24	WAMESA	AMBUAR	8	2	5	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	140,700,000	4,488,000	2,560,000	192,610,100	737,858,100
25		KARJUAN	8	3	5	5	2	192,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	394,500,000	140,700,000	4,692,000	2,560,000	192,610,100	735,062,100
26		YARPATE	8	3	5	5	2	204,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	406,500,000	140,700,000	4,692,000	2,560,000	217,610,100	631,362,100

NO	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	JML APARAT & UNSUR DI KAMPUNG				SITAP/TUNJANGAN/INSENTIF UNSUR DIKAMPUNG						JMLH HONOR/TUNJANGAN/INSENTIF	Anggaran OPS Pemekaran Sesuai Kategori	ALOKASI KINERJA	BPIS KETENAGA KERJAAN	BPIS KESEHATAN	OPERASIONAL & PROGRAM KEGIATAN	PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG
			RT	BPD	Tokoh/linmas	Kades & perangkat	RT	Baperkam	Tokoh2	Linmas									
											RT	BPD							
27		YOMBKIRI I	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	150,700,000		4,488,000	2,560,000	221,943,500	777,191,500	
28		ISENEBUAY	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	150,700,000	73,946,000	4,488,000	2,560,000	221,943,500	700,437,500	
29		YOMAKAN	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	150,700,000		4,488,000	2,560,000	221,943,500	777,191,500	
30	RUMBERPON	ISEREN	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	150,700,000		4,488,000	2,560,000	221,943,500	777,191,500	
31		YEMBKIRI II	8	2	5	2	192,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	385,500,000	150,700,000		4,488,000	2,560,000	221,943,500	765,191,500	
32		VARIARI	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	150,700,000		4,488,000	2,560,000	221,943,500	851,137,500	
33		WETTINDAU	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	150,700,000		4,488,000	2,560,000	221,943,500	777,191,500	
34		WOSIMI	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	130,700,000		4,488,000	2,560,000	201,943,500	606,491,500	
35		SAPARTI	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	130,700,000		4,488,000	2,560,000	181,943,500	717,191,500	
36	NAIKERE	YABORE	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	130,700,000		4,488,000	2,560,000	221,943,500	626,491,500	
37		OYAA	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	130,700,000		4,488,000	2,560,000	221,943,500	626,491,500	
38		INYORA	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	130,700,000		4,488,000	2,560,000	221,943,500	626,491,500	
39		UNDURARA	8	3	5	2	204,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	406,500,000	130,700,000		4,692,000	2,560,000	221,943,500	635,695,500	
40		RASIEI	8	3	5	2	192,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	394,500,000	130,700,000	73,946,000	4,692,000	2,560,000	181,943,500	788,341,500	
41		TOREY	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	130,700,000		4,488,000	2,560,000	181,943,500	717,191,500	
42		ISEY	8	3	5	2	204,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	406,500,000	130,700,000		4,692,000	2,560,000	181,943,500	726,395,500	
43		URIEMI	8	3	5	6	204,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	43,200,000	435,300,000	130,700,000		5,008,000	2,560,000	181,943,500	625,311,500	
44	RASIEI	SASIREI	8	2	5	2	192,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	385,500,000	130,700,000		4,488,000	2,560,000	181,943,500	705,191,500	
45		TANDIA	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	130,700,000		4,488,000	2,560,000	181,943,500	586,491,500	
46		WEBI	8	2	5	2	192,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	385,500,000	130,700,000		4,488,000	2,560,000	181,943,500	574,491,500	
47		YOMBA	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	130,700,000	73,946,000	4,488,000	2,560,000	181,943,500	791,137,500	
48		SENDERAWOY	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	130,700,000		4,488,000	2,560,000	181,943,500	717,191,500	
49		AMBUMI	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	130,700,000		4,488,000	2,560,000	181,943,500	586,491,500	
50		NANIMORI	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	130,700,000		4,488,000	2,560,000	181,943,500	586,491,500	
51	KURI WAMESA	DUSNER	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	130,700,000		4,488,000	2,560,000	181,943,500	586,491,500	
52		YERENUSI	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	130,700,000	73,946,000	4,488,000	2,560,000	181,943,500	791,137,500	
53		SOBIAR/SIMIEI	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	130,700,000		4,488,000	2,560,000	181,943,500	717,191,500	
54		MUANDARISI	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	130,700,000		4,488,000	2,560,000	181,943,500	717,191,500	

NO	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	JUMLAH APARAT & UNSUR DI KAMPUNG				SILTAJ/TUNJANGAN/INSENTIF UNSUR DIKAMPUNG				JMLH HONOR/TUNJANGAN/INSENTIF	Anggaran Pemekaran Sesuai Kategori	ALOKASI KINERJA	BPJS KETENAGA KERJAAN	BPJS KESEHATAN	OPERASIONAL & PROGRAM KEGIATAN	PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG
			Kades + Perangkat	RT	BPD	Tokoh2	Limmas	Kades & perngkat	RT	Baperkam							
55		YENDE	8	3	5	2	204,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	406,500,000	140,700,000	73,946,000	2,560,000	192,610,100	747,062,100
56		SYABES	8	3	5	2	204,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	406,500,000	140,700,000	73,946,000	2,560,000	192,610,100	821,008,100
57		MENARBU	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	140,700,000	73,946,000	2,560,000	192,610,100	737,858,100
58	ROON	NIAB	8	3	5	2	204,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	406,500,000	140,700,000	73,946,000	2,560,000	217,610,100	631,362,100
59		INDAY	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	140,700,000	73,946,000	2,560,000	217,610,100	622,158,100
60		SARIAY	8	3	5	2	204,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	406,500,000	140,700,000	73,946,000	2,560,000	192,610,100	747,062,100
61		MENA	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	140,700,000	73,946,000	2,560,000	217,610,100	696,104,100
62		WAPRAK	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	150,700,000	73,946,000	2,560,000	192,610,100	747,858,100
63	ROSWAR	YOMBER	8	3	5	2	204,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	406,500,000	150,700,000	73,946,000	2,560,000	217,610,100	631,362,100
64		SETWAR	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	150,700,000	73,946,000	2,560,000	192,610,100	747,858,100
65		NORDIWAR	8	3	5	2	204,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	406,500,000	150,700,000	73,946,000	2,560,000	217,610,100	631,362,100
66		WERABUR	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	150,700,000	73,946,000	2,560,000	217,610,100	696,104,100
67		MAMISI	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	150,700,000	73,946,000	2,560,000	192,610,100	821,804,100
68	NIKIWAR	WERIANGGI	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	150,700,000	73,946,000	2,560,000	217,610,100	747,858,100
69		KUREI	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	150,700,000	73,946,000	2,560,000	217,610,100	696,104,100
70		TAMOGI	8	3	5	2	204,900,000	27,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	406,500,000	150,700,000	73,946,000	2,560,000	217,610,100	631,362,100
71		KAPRUS	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	150,700,000	73,946,000	2,560,000	212,610,100	767,858,100
72		YARMATUM	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	150,700,000	73,946,000	2,560,000	212,610,100	767,858,100
73	SOUG JAYA	REYOB	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	150,700,000	73,946,000	2,560,000	212,610,100	841,804,100
74		SIRESI	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	150,700,000	73,946,000	2,560,000	212,610,100	767,858,100
75		NUSPAIRO	8	2	5	2	204,900,000	18,000,000	115,200,000	45,000,000	14,400,000	397,500,000	150,700,000	73,946,000	2,560,000	212,610,100	767,858,100
JUMLAH ADD												7,095,700,000	1,035,244,000	344,148,000	192,000,000	14,825,757,500	53,485,949,500

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA RAGIAN HUKUM

ROBERTH M. P. NUNYAKI, SH

NIP. 19760410 200312 1 007

BUPATI TELUK WONDAMA

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR